

BHAGAVADGĪTĀ: KEBEBASAN, MORAL, KEBAHAGIAAN

# BASIS



**Tianxia :**  
Filsafat China  
tentang  
Tata Pemerintahan  
Dunia

---

**Seabad**  
Sartono Kartodirdjo  
(1921-2021):  
Bacaan dan  
Santapan

---

**Vaksin Covid dan**  
Kultus Individu

---

SISYPHUS #2, 2018  
karya BUDI SANTONO

# BASIS

menembus fakta

SIUPP No. 213/SK/MENPEN/SIUPP/D/1/1986.

Jd Ditjen PPG

Nomor 32/Ditjen/PPG/K/1996-27 Maret 1996

Penerbit

Yayasan BP Basis

Anggota SPS-ISSN: 0005-6138

Penasihat

Frans Magnis-Suseno

P Swantoro

Pemimpin Umum

Sindhunata

Pemimpin Redaksi

A. Setyo Wibowo

Wakil Pemimpin Redaksi

A. Sudlarja

Redaktur Pelaksana

A. Bagus Laksona

Wakil Redaktur Pelaksana

Purnawijayanti

Redaksi

B. Hari Juliwani

Heru Prakosa

B. Rahmanto

C. Bayu Risanto

Redaktur Artistik

Hari Budiono

Purnawijayanti

Promosi/Iklan

Slamet Riyadi, A. Yulianto

Willy Putranta

Administrasi/ Distribusi

Anang Pramuriyanto

Maria Dwijayanti

Kuangan

Francisca Triharjanti, Ani Ratna Sari

Alamat

Jl Pringgokusuman No. 35, Yogyakarta

Telepon: 08122525473, Faks: (0274) 546811

—

Surel administrasi/ distribusi:

basis.adisi@gmail.com

Surel redaksi: majalahbasis@gmail.com

—

Rekening:

BCA Sudirman Yogyakarta No. 0370285110

a.n. Sindhunata, BRI Cik Ditiro Yogyakarta No. 0029-

01-000113-56-8 a.n. Sindhunata

BNI Cab. Yogyakarta No. 1952000512

a.n. BPK Sindhunata

TANDA TANDA ZAMAN / Sindhunata  
Monster yang Memperlambat Modernitas ... 2

SOSIAL / Bandung Mawardi  
Cangkem Gatel ... 4

SOSIAL / Setyaningsih  
Niscaya Bergunjing ... 8

SOSIAL / M. Faizi  
Habib Tengka, Terbitlah Gosip ... 12

SOSOK / Atep Kurnia  
Moh. Ambril: Bersastra Obrolan ... 18

SASTRA / Mario F. Lawi  
Fama Para Penyair dalam  
Epigram-Epigram Martialis ... 23

SASTRA / Wahyu Kris Aries Wirawardana  
Pentigraf:  
Sastra Komunal Era Digital ... 31

SOSOK / Jafar Suryomenggolo  
1950-an dan 1960-an:  
Kho Ping Hoo dan Cerpen ... 33

BUKU / Dodit Sulaksono  
Yang (Belum) Ditemukan  
dan Disampaikan ... 37

PENDIDIKAN / Clemens Dion Yusilia Timur  
Paulo Freire:  
Demokrasi Radikal & Pendidikan Demokratis ... 42

PUISI / Sindhunata  
Cinta Itu Naik Perahu ... 58

CERPEN / Putri Hati Ningsih  
Kiai Alam Tara ... 61

BUKU / Albertus Erwin Susanto  
Penyelesaian Kasus 1965:  
Tak Mau dan Tak Mampu ... 61

70 Tahun Majalah Basis / Bandung Mawardi  
Terbaca dan "Terasa" Religius ... 67



**Santana Prima Tour**  
your travelling partner

Jl. Diponegoro 116, Yogyakarta  
Email: tour.santana@yahoo.com

(0274) 513873  
WA: 0877-3964-2832

**SANTANA MONIKAYA**  
**MONEY CHANGER**

Jl. Diponegoro 116, Yogyakarta 55233

(0274) 513 873  
(0878) 3428 9151

**Reservasi:** • e-tiket pesawat dalam dan luar negeri • e-tiket kereta api • e-voucher hotel dalam dan luar negeri  
• Paket tour dalam dan luar negeri • Pembuatan kartu identitas pelajar internasional/ ISIC • MICE  
• Pengurusan paspor, visa dan asuransi perjalanan • Medical evacuation & charter flight • Money changer

# Tianxia 天下:

## Filsafat Cina tentang Tata Pemerintahan Dunia

Literatur Hubungan Internasional (HI) menerjemahkan *Tianxia* sebagai “segala di bawah langit” (*all under Heaven*). *Tianxia* adalah filsafat politik China yang berbicara mengenai gubernasi atau pemerintahan. Pandangan ini sudah tertulis dalam literatur klasik China pada abad keempat sebelum masehi pada waktu daratan China dikuasai oleh Dinasti Zhou (1046–256SM).

KLAUS HEINRICH RADITIO

**M**engapa *Tianxia* layak mendapat perhatian oleh para peminat filsafat dan politik (khususnya ilmu HI dan kajian China)? Pertama, filsafat *Tianxia* telah berhasil mendapatkan tempat dalam diskursus akademik internasional sejak Zhao Tingyang menerbitkan buku yang berjudul “Sistem *Tianxia*: Filsafat untuk Institusi Dunia” (*天下体系：世界制度哲学导论*) tahun 2005. Zhao Tingyang adalah filsuf China dari *Chinese Academy Social Sciences* (CASS), lembaga penelitian papan atas yang berafiliasi dengan pemerintah.

Kedua, seiring dengan peran China di politik internasional yang semakin kuat, dibutuhkan pemahaman yang solid tentang motivasi dan maksud Beijing dalam menjalankan politik luar negerinya. China adalah negara yang selalu menilik kepada sejarah dalam mendapatkan referensi. John King Fairbank (1907–1991), seorang sinolog dari *Harvard University*, pernah menyampaikan bahwa untuk memahami perilaku China, perspektif se-

jarah bukanlah sesuatu yang berlebihan melainkan suatu keharusan. H.R. McMaster menceritakannya dalam artikel di *The Atlantic*, edisi Mei 2020, “How China Sees the World”. Masih dari artikel yang sama, hal ini juga ditegaskan oleh Presiden AS Donald Trump dalam kunjungan kenegaraan ke China pada 2017 lalu yang memiliki kesan bahwa “sepanjang kunjungan kenegaraan kami, Presiden Xi dan para penasihatnya sangat bergantung kepada sejarah untuk menyampaikan pesan-pesan mereka dengan menekankan topik-topik tertentu dan menghindari topik-topik yang lain.”

Ketiga, sejak Hu Jintao berkuasa, para pengamat telah melihat adanya unsur-unsur filsafat *Tianxia* dalam doktrin politik para pemimpin China, terutama “Masyarakat Harmonis” (和谐社会). Presiden Xi Jinping dengan doktrin politik “Komunitas dengan Masa Depan Bersama untuk Manusia” (人类命运共同体) sangat menampakkan unsur-unsur filsafat *Tianxia*. Yang lebih terang benderang, sebagaimana disoroti Daniel Tobin (fakultas studi China di National Intelligence University (NIU) Bethesda, Maryland, dan mantan tenaga spesialis

China untuk Departemen Pertahanan AS) dalam makalahnya di hadapan Komisi Peninjau Ekonomi dan Keamanan AS-China, "How Xi Jinping's 'New Era' Should Have Ended US Debate on Beijing's Ambitions", adalah pidato Xi Jinping di Kongres Nasional Partai Komunis China ke-19 di mana Xi secara gamblang menyebut "Tianxia":

*"Adalah ide dari Tianxia (segala di bawah langit) membentuk satu keluarga yang harus memandu manusia sehingga kita dapat merangkul satu sama lain dengan lengan terbuka dan menciptakan fondasi yang sama serta menyingkirkan perbedaan-perbedaan kita. Bersama, kita harus berjuang untuk membangun komunitas dengan masa depan bersama untuk umat manusia (人类命运共同体)." Sciring dengan bertumbuhnya kekuatan komprehensif China, Beijing menginginkan untuk menjadi kontributor dunia bukan hanya di bidang ekonomi, tetapi juga politik dan filsafat. Beijing memahami bahwa negara besar seharusnya bukan hanya menjadi eksportir barang dan jasa, tetapi juga ide.*

Selain itu, dengan bangkitnya China menjadi salah satu negara adikuasa, tata pemerintahan dunia juga akan mengalami beberapa penyesuaian. Peran unipolar Amerika Serikat tentu tidak bisa terus dipertahankan. Bagaimana China akan membentuk tata pemerintahan dunia yang baru tergantung kepada bagaimana China melihat perannya dalam sejarah. Peran apa yang dimainkan China, dan tata pemerintahan dunia seperti apa yang diinginkan, telah termaktub dalam filsafat *Tianxia*. Itulah sebabnya memahami filsafat ini menjadiendesak untuk memahami China dan tatanan pemerintahan dunia masa depan.

### **Tianxia: Selayang Pandang**

Pada dasarnya *Tianxia* adalah konsep pemerintahan tradisional China yang diklaim telah berusia 3.000 tahun (Zhao Tingyang, *Redefining A Philosophy for World Governance*, 2019). Konsep *Tianxia* dekat dengan ide kekaisaran (*empire*). Dalam tulisannya di *Social Identities: Journal for the Study of Race, Nation and Culture* tahun 2006 bertajuk "Rethinking Empire from a Chinese Concept 'All-under-Heaven' (Tianxia)", Zhao telah menjelaskan bahwa ide di sini dipahami dalam konteks filosofi Platon, yaitu substansi dari sesuatu yang membuatnya menjadi sesuatu itu (*makes it as it is*). Ide juga menyiratkan konsep ideal tentang sesuatu seperti yang diharapkan. Jadi, dapat dikatakan *Tianxia* adalah sub-

stansi pemerintahan yang membuatnya disebut sebagai kekaisaran yang sebenar-benarnya.

Dalam literatur klasik China, istilah *Tianxia* muncul sekitar awal periode *Warring States* di zaman dinasti Zhou. Ini dipaparkan Mark Edward Lewis dan Mei-yu Hsieh, dalam "Tianxia and the Invention of Empire in East Asia" di buku *Chinese Visions of World Order: Tianxia, Culture and World Politics* (2017). Zhou adalah sebuah dinasti yang berdiri setelah menggulingkan dinasti sebelumnya, yaitu Shang, dengan menggunakan kekuatan militer. Dinasti Shang memerintah daratan China dengan kekerasan dan menyukai pertumpahan darah.

Salah satu suku kecil, yaitu Zhou, memimpin pemberrontakan yang didukung oleh beberapa suku yang lain. Pada saat itu ada sekitar 1.000 suku di daratan China, dan suku Zhou adalah salah satu yang terkecil dengan populasi hanya 70.000 orang, demikian catatan Zhao dalam "A Political World Philosophy in terms of All-under-heaven (Tianxia)" di Jurnal *Diogenes*, 221 (2009). Masih dari makalah yang sama, dipaparkan bahwa suku Shang yang memerintah terdiri atas lebih dari satu juta orang. Walaupun kecil, Zhou berhasil menumbangkan Dinasti Shang dan kemudian berkuasa selama 8 abad dari 1046 hingga 256 SM, menjadikannya dinasti terlama dalam sejarah politik China.

Setelah memegang kekuasaan, pemimpin suku Zhou memikirkan tentang sistem pemerintahan yang langgeng dengan belajar dari pengalaman. Sang pemimpin memformulasikan pemikiran sebagai dasar pemerintahan Dinasti Zhou yang mengandung nilai-nilai universalisme, distribusi kesejahteraan umum yang adil, dan keharmonisan di antara suku-suku bangsa yang berbeda. Sistem universal inilah yang disebut oleh Dinasti Zhou sebagai *Tianxia* (segala di bawah langit).

Dengan demikian, Dinasti Zhou menjadi yang pertama dalam meletakkan dasar-dasar bagi "politik" dalam sejarah China. Politik dalam bahasa mandarin berarti "tata pemerintahan yang adil" (政治). Berbeda dengan "politik" di Barat - yang bermula dari polis Yunani di mana tata pemerintahan disusun berdasarkan manajemen terhadap permasalahan-permasalahan dalam polis - tata pemerintahan China diformulasikan dari perspektif dunia atau semesta. Karena itu, dalam sistem *Tianxia* tidak dikenal istilah negara gagal (*failed states*), yang ada adalah dunia yang gagal (*failed world*). Tidak mungkin ada negara yang berhasil dalam dunia yang gagal.

**Tabel 1. Pemerintahan Dinasti-dinasti di Chinasebelum dan hingga Dinasti Han**

|                  |                           |  |
|------------------|---------------------------|--|
| 2100-1600 BCE    | Xia                       |  |
| 1600-1050 BCE    | Shang                     |  |
| 1046-256 BCE     | Zhou                      |  |
|                  | Zhou Barat (1046-771 BCE) |  |
|                  | Zhou Timur (771-256 BCE)  | Periode Spring and Autumn (770-475 BCE)  |
|                  |                           | Konfusius (551-479 BCE)  |
|                  |                           | Periode Warring States (475-221 BCE)   |
| 221-206 BCE      | Qin                       | China menjadi satu entitas politik   |
| 206 BCE - 220 CE | Han                       |  |
|                  | Han Awal (206 BCE - 9 CE) |  |
|                  |                           | Konfusianisme secara resmi ditetapkan menjadi dasar pemerintahan oleh Kaisar Wudi (141-86 BCE) |
|                  | Han Kemudian (25-220 CE)  |  |

Sumber: Timeline of Chinese History and Dynasties", 2009-2020 Asia for Educators, Columbia University, [http://afc.easia.columbia.edu/timelines/china\\_timeline.htm](http://afc.easia.columbia.edu/timelines/china_timeline.htm)

Seiring dengan perjalanan sejarah politik China, konsep *Tianxia* tidak memiliki penafsiran tunggal. Sejak dinasti Qin menggantikan Dinasti Zhou, Kaisar Qin Shihuang mempersatukan seluruh daratan China menjadi satu entitas politik dengan kekuatan militer. China yang tadinya merupakan wilayah dengan banyak suku dengan daerah otonomi masing-masing (*sub-states*) disatukan menjadi satu negara kekaisaran di mana Kaisar Qin Shihuang menjadi pemimpin absolut.

Sejak China menjadi satu entitas politik, maka *Tianxia* mengalami pergeseran makna dari sistem pemerintahan yang mengatur dunia - yang terdiri dari negara pusat dan *sub-states* (*Tianxia* Dinasti Zhou) menjadi sistem pemerintahan yang mengatur negara kekaisaran China (*Tianxia* Dinasti Qin-Han). *Tianxia* yang dipromosikan oleh Zhao Tingyang pada 2005 dan menjadi rujukan pemerintah China saat ini adalah *Tianxia* Dinasti Zhou.

*Tianxia* memiliki 3 arti, di mana ketiga arti tersebut sekaligus menjadi unsur-unsur pembentuk yang mendefinisikan konsep ini. Pertama, *Tianxia* berarti tanah atau dunia. Ini menjadi unsur pembentuk *Tianxia*

yang pertama, yaitu geografis. Kedua, *Tianxia* berarti kehendak/hati rakyat (民心). Ini berarti bahwa konsep ini menjadikan rakyat sebagai konstituen utama dari sistem pemerintahan. Dalam konsep *Tianxia*, kekuasaan bukan semata-mata ditandai oleh luasnya wilayah yang ditaklukkan, tetapi juga legitimasi politik dari masyarakat yang dipimpin. Suatu sistem pemerintahan adalah sah jika mendapatkan legitimasi dari rakyat. Ini adalah *ide* (sesuai konsep *ide Platon*) kekuasaan politik yang sebenar-benarnya. Zhao dalam *Redefining A Philosophy for World Governance* menyebut unsur yang kedua ini sebagai unsur sosio-psikologis. Arti sekaligus unsur yang ketiga dari *Tianxia* adalah institusi dunia. Unsur ini bersifat politis. *Tianxia* menjadikan dunia sebagai entitas politik utama, bukan negara. Secara konkret, institusi dunia tersebut terdiri atas 6 prinsip, seperti diuraikan Zhao dalam "A Political World Philosophy in terms of All-under-heaven (Tianxia)".

Pertama, sistem monarki dan unsur-unsur aristokrat. Sistem *Tianxia* dipimpin oleh seorang Kaisar yang berperan sebagai Putera Langit (*Son of Heaven*, 天子). Kaisar ini menjadi penentu kebijakan yang dihormati karena kebijaksanaan (yang bersumber dari etika Konfusius) dan kemampuan manajerialnya. Jika Sang Kaisar tidak dapat menjaga kestabilan dan keadilan seluruh sistem, maka mandatnya boleh dicabut dengan sebuah revolusi.

Kedua, sistem jaringan terbuka yang terdiri atas pemerintahan dunia secara umum dan negara-negara bawahan (*sub-states*). Ini berarti dalam sistem *Tianxia* tidak ada kesetaraan. Negara-negara bawahan mengakui keunggulan pemerintahan negara pusat, terutama dari segi budaya dan peradaban. Walaupun demikian, dalam sistem *Tianxia* tidak ada paksaan, setiap negara bebas untuk memilih atau menolak bergabung. Sistem *Tianxia* harus menjamin bahwa mereka yang tergabung dalam jaringan ini menjadi lebih makmur, dan dengan demikian menjadi daya tarik bagi negara-negara yang tidak/belum bergabung.

Ketiga, pemerintahan dunia bertanggung jawab terhadap kelangsungan institusi universal, hukum, tata aturan, dan kestabilan. Pemerintahan dunia menjadi penengah (*arbiter*) dalam sengketa antara negara; mengendalikan distribusi sumber daya alam seperti aliran sungai, mineral; memiliki wewenang untuk memeriksa dan mengakui legitimasi negara-negara bawahan; dan memberikan sanksi kepada negara-negara bawahan yang mengganggu kestabilan seluruh sistem.

Keempat, negara bawahan memiliki otonomi dan kemerdekaan untuk mengatur ekonomi, budaya, norma sosial, tetapi mereka tidak berdaulat secara politik. Mereka diwajibkan untuk memberikan kontribusi dalam produksi sumber daya alam, bantuan di saat bencana alam, dan pengendalian aliran air.

Kelima, pemerintahan dunia menjamin kerja sama dalam jangka waktu panjang dan memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya maupun kekuatan militer terhadap negara-negara bawahan.

Keenam, kebebasan mobilitas bagi seluruh populasi untuk bermigrasi ke wilayah mana pun karena sistem *Tianxia* tidak mengenal batas-batas negara atau kedaulatan teritorial. Demikian juga tidak dikenal "kebijakan luar negeri" karena *Tianxia* (semua di bawah langit) mencakup seluruh dunia, baperspektif dunia (bukan negara) dan tidak mengecualikan pihak mana pun.

Sekilas, konsep *Tianxia* terkesan mirip dengan konsep Perdamaian Abadi yang dirumuskan Immanuel Kant tahun 1795. Namun, kedua konsep ini berbeda. Kant mengimajinasikan sebuah republik universal untuk penduduk dunia, yang berarti ada negara yang sangat besar yang menyerap semua negara. Kant menganggap ide ini tidak realistis karena tidak ada negara yang ingin dianeksasi menjadi bagian dari negara lain, dan republik universal ini tidak akan bisa melayani kepentingan atau aspirasi semua negara.

Apabila ditinjau, sistem *Tianxia* juga tidak menyerap negara-negara bawahan (*sub-states*), tetapi memberikan otonomi penuh atas kegiatan ekonomi, sosial dan budaya. Konstelasi hirarkis antara negara pusat dan negara-negara bawahan tetap dipertahankan.

Kant kemudian merevisi idenya menjadi persekutuan damai dari negara-negara bebas. Persekutuan ini relatif mudah dibentuk karena negara-negara yang tergabung memiliki nilai, budaya, dan sistem politik yang sama. Uni Eropa merupakan manifestasi dari ide Kant ini. Dalam *Redefining A Philosophy for World Governance*, Zhao mengajukan dua alasan mengapa ide Kant ini memiliki keterbatasan dalam menyelesaikan permasalahan dunia.

Pertama, teori ini tidak universal karena menuntut negara-negara untuk menjadi homogen dari segi sistem dan budaya politik. Hal ini menurut Zhao tidak mungkin terjadi. Dalam praktik politik internasional, China terus menuntut pengakuan Barat akan sistem yang berbeda. Bahkan, China merasa lebih menghargai perbedaan dengan menerapkan kebijakan "satu negara

dua sistem" (一国两制) untuk Hong Kong dan Macau. Lebih lagi, dalam menghadapi Covid-19, China menjadi lebih percaya diri dengan sistem politik nondemokratis yang tampaknya lebih efektif daripada sistem politik Barat yang tidak berdaya melawan pandemi.

Kedua, negara-negara dengan sistem yang sama bukan berarti tidak memiliki konflik kepentingan. Solusi Kant hanyalah kesepakatan antarnegara, bukan sistem yang dapat bertahan melawan tantangan bersama dan melampaui sekat-sekat negara.

Demikian juga dengan PBB, menurut Zhao Tingyang, bukanlah sistem yang menyerupai *Tianxia*. PBB bukanlah institusi dunia yang dimaksud oleh konsep *Tianxia*. PBB berprinsip internasional, berarti PBB berfungsi mengoordinasi negara-negara dalam mengegosiasikan kepentingan mereka dan membuat kesepakatan bersama. PBB bukanlah institusi pemerintahan dunia (Zhao, dalam "A Political World Philosophy in terms of All-under-heaven (*Tianxia*)". Menurut Zhao ("Rethinking Empire from a Chinese Concept 'All-under-Heaven' (*Tianxia*)" di *Jurnal Social Identities: Journal for the Study of Race, Nation and Culture*, 12:1 (2006)), PBB lebih pantas disebut pasar politik untuk bangsa-bangsa, dan bukan institusi untuk dunia.

Sistem politik yang kita miliki sekarang adalah hasil dari Perjanjian Westphalia tahun 1648, yang menjadikan negara bangsa sebagai entitas politik tertinggi. Sedangkan menurut Zhao Tingyang, dunia kita belum memiliki institusi sendiri yang melayani kepentingan dunia. Zhao menafsirkan filsafat politik China yang melihat bahwa dunia memiliki kepentingannya sendiri. Di dalam sistem Westphalia, kepentingan tertinggi adalah kepentingan nasional tiap negara yang akan terus menjadi sumber konflik. Di dalam *Tianxia*, kepentingan tertinggi adalah kepentingan dunia secara keseluruhan. Yang dapat melayani kepentingan dunia ini adalah institusi dunia, bukan institusi antarbangsa (internasional).

Sebagai contoh adalah dunia kita dalam situasi pandemi. Kepentingan dunia adalah memberikan akses kesehatan kepada seluruh penduduk dan mengakhiri pandemi. Sedangkan kepentingan nasional adalah menjamin kesehatan penduduk masing-masing negara. Dengan paradigma politik kepentingan nasional, yang terjadi adalah *lock-down* wilayah kedaulatan negara. Negara-negara maju dengan fasilitas kesehatan yang memadai bisa lebih menjamin keselamatan warganya. Di dalam institusi internasional pun tidak ada kerja sama yang efektif karena negara-negara saling bertarung

untuk kepentingan nasionalnya. Bahkan, karena vaksin yang sulit diproduksi dan jumlahnya sangat terbatas, dunia mendapat ancaman "vaccine nationalism" yang berarti distribusi vaksin tidak akan merata dan berpotensi dimonopoli negara-negara kuat. Marco Hafner dkk membuat laporan penelitian atas situasi ini dengan judul "COVID-19 and the cost of vaccine nationalism" (RAND Corporation, 2020). *The strong do what they can and the weak suffer what they must* (Thucydides, *History of the Peloponnesian War*). Sistem Westphalia akan sangat terbatas dalam menyelesaikan masalah-masalah dunia seperti pandemi, perubahan iklim, terorisme, atau perang antarnegara. Ini karena perspektif politik yang berlaku di masa ini adalah perspektif negara-bangsa atau perspektif antarnegara/antarbangsa, bukan perspektif dunia.

Tabel 2. Perbedaan Kedua Sistem Politik

|  | Sistem Westphalia             | Sistem Tianxia                   |
|--|-------------------------------|----------------------------------|
| Konsep kunci   | Negara bangsa                 | Dunia                            |
|  | Institusi antarbangsa (PBB)   | Institusi dunia (sistem Tianxia) |
|  | Kepentingan nasional          | Kepentingan dunia                |
|  | Negara gagal (failed states)  | Dunia gagal (failed world)       |
| Hierarki Prioritas Politik* (mulai dari yang terpenting) | Individu - komunitas - negara | Dunia - sub-states - keluarga    |

\*Hierarki prioritas seperti dijelaskan Fei-Ling Wang dalam "From Tianxia to Westphalia: The Evolving Chinese Conception of Sovereignty and World Order" di buku *America, China and the Struggle for World Order: Ideas, Traditions, Historical Legacies, and Global Visions* (2015).

### *Belt and Road Initiative:*

#### Usaha mengkonkretkan *Tianxia*

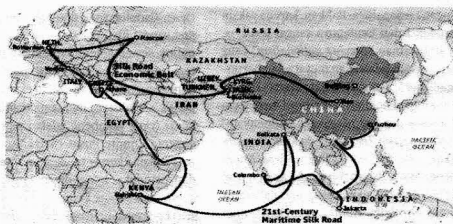
Seperti disampaikan dalam Pengantar, para pemimpin China meminjam filsafat *Tianxia* dalam menyampaikan doktrin-doktrin politik. Bahkan, kata *Tianxia* diucapkan oleh Presiden Xi Jinping dalam Kongres Nasional Partai Komunis China ke-19 (pertemuan politik paling penting dalam struktur politik Republik Rakyat China).

Namun, *Tianxia* sebagai konsep tidak memiliki arti jika hanya menjadi inspirasi pidato atau doktrin politik. Dapat dicatat sebelumnya, bahwa dalam sejarah RRT, terutama sejak Reformasi dan Keterbukaan oleh

Deng Xiaoping yang dimulai awal tahun 1980-an, Beijing sangat lihai dalam implementasi doktrin-doktrin politik sesuai kebutuhan zaman (atau mungkin lebih tepat disebut sebagai eksperimen politik?), misalnya dengan mengawinkan sistem ekonomi pasar dan sistem politik sosialisme, menempatkan para wirausahawan besar (yang notabene adalah pemilik modal) sebagai anggota Komite Pusat Partai "Komunis". Dalam konteks inilah *Tianxia* tidak akan diterapkan secara kaku dan 'ortodoks', tetapi dengan luwes sesuai zaman dan kebutuhan Beijing. Pemerintahan Xi Jinping sejak tahun 2013 berusaha mengkonkretkan *Tianxia* melalui *Belt and Road Initiative* (BRI), atau yang dalam Bahasa Indonesia disebut Prakarsa Sabuk dan Jalan. Jika menilik 6 unsur *Tianxia* sebagai institusi dunia, BRI memiliki beberapa karakter yang sesuai dalam konteks politik kontemporer.

Pertama, BRI memang tidak bermaksud untuk menciptakan *super-state* atau entitas politik raksasa yang menyerap negara-negara anggotanya, tetapi BRI menciptakan jaringan banyak negara yang berpusat pada China (Salvatore Babones, "From *Tianxia* to *Tianxia*: The Generalization of a Concept", dalam *Chinese Political Science Review*, 5 Tahun 2020). Jonathan E. Hillman dalam *The Emperor's New Road: China and the Project of the Century* (2020) mencatat BRI memberikan bantuan modal dan material untuk membangun infrastruktur bagi negara-negara berkembang sebesar USD 1 Triliun. Jumlah ini adalah tujuh kali dari dana *Marshall Plan* untuk membangun Eropa Barat yang hancur akibat Perang Dunia II, dan lima kali dana yang diajukan Presiden Trump kepada Kongres untuk membangun infrastruktur di AS. Pembangunan infrastruktur di negara-negara berkembang tersebut telah direncanakan sedemikian rupa sehingga membentuk suatu sistem ekonomi yang terintegrasi. Negara-negara penerima bantuan infrastruktur akan dengan mudah berkiblat kepada negara kuat yang mampu mewujudkan impian infrastruktur mereka.

Selain itu, dalam "Understanding China's Belt and Road Initiative" (2017) Peter Cai menuliskan bahwa BRI juga dimaksudkan untuk membantu mengatasi masalah kelebihan kapasitas di China. Kelebihan kapasitas (*over capacity*) bukanlah kelebihan produksi (*over production*). Yang dimaksud kelebihan kapasitas adalah China memiliki kelebihan alat-alat produksi, terutama untuk membuat besi baja, semen, dan kaca. Melalui BRI, China bermaksud untuk memindahkan alat-alat produksi



Gambar 1 Jalur Konektivitas BRI

Sumber: <https://medium.com/@markuspatrick/chinas-one-belt-one-road-initiative-invest-vietnam-chapter-c29f5d1dd8c8?Penutup>

mereka ke negara-negara yang tergabung dalam BRI supaya dapat berfokus pada industri-industri dengan teknologi canggih. China juga bermaksud mengeksport standar teknologi mereka untuk diterima oleh negara-negara penerima bantuan. Kebijakan ini bermaksud menguatkan posisi China sebagai kiblat industri dan teknologi.

Kedua, BRI tidak memaksa negara mana pun untuk bergabung, keanggotaannya bersifat sukarela. Sukarela ini merupakan prinsip *Tianxia* yang bermaksud mencakup semua tanpa paksaan. BRI menyebarkan daya tarik kepada negara-negara lain untuk bergabung dengan memberikan manfaat. Dari sudut pandang politik, negara-negara yang bergabung sedikitnya bukan negara yang anti terhadap sistem China. Bahkan, beberapa negara memiliki kekaguman terhadap sistem politik Beijing yang memampukan pembangunan berlangsung begitu masif dalam waktu yang singkat. Negara-negara Asia Tengah, misalnya yang dikuasai oleh diktator, tidak memiliki keberatan untuk bergabung dengan BRI. Indonesia ikut dalam BRI karena di satu pihak ingin memanfaatkan kesempatan untuk pembangunan infrastruktur, dan di lain pihak tidak mau dipaksa untuk bersandar pada salah satu kekuatan adidaya yang bersaing di kawasan.

Ketiga, *Tianxia* adalah sistem yang hierarkis dan tidak egaliter. Sekalipun negara-negara bawahan di-

berikan kemerdekaan ekonomi, namun secara politik kekuasaan politik tetap berada di negara pusat. Beijing tidak menunjukkan minat untuk mencampuri urusan politik domestik negara lain, namun sudah menjadi naturnya untuk merasa diri sebagai negara yang lebih besar dan menuntut pengakuan sesuai dengan status tersebut. Satu kalimat dari Menlu China Yang Jiechi yang diucapkan tahun 2010 pada kesempatan ASEAN Regional Forum (ARF) di Hanoi tidak pernah akan dilupakan oleh negara-negara ASEAN: *"China is a big country and you are small countries and that is a fact"* (Tom Mitchell, "China struggles to win friends over South China Sea" di *Financial Times*, 13 Juli 2016). Konteks kalimat ini adalah ketika pertemuan ARF berlangsung, *US Secretary of State Hillary Clinton* menyampaikan bahwa kebebasan pelayaran (*freedom of navigation*) di Laut China Selatan (LCS) adalah kepentingan nasional AS. Clinton menyampaikan hal ini terkait dengan ketakutan negara-negara ASEAN akan perilaku China yang semakin asertif di LCS. Yang Jiechi tampaknya merasa tersudut dengan pernyataan tersebut dan ketika mendapat kesempatan, ia menggunakan 30 menit untuk berbicara dan menyampaikan "mantra" tersebut sambil menatap Menlu Singapura, George Yeo. Dari kalimat tersebut jelas terbaca bahwa China memosisikan dirinya tidak setara dengan negara-negara ASEAN (dan negara-negara lain)



Ketidaksetaraan ini juga menjadi praktik dalam BRI. Negara-negara yang bergabung akan berorientasi dan tergantung kepada Beijing, apalagi dengan bertambahnya volume perdagangan, investasi, dan konektivitas antara China dan negara-negara Asia dan Eropa ("How Will the Belt and Road Initiative Advance China's Interests?", *CSIS*, 8 Mei 2017). China akan menggunakan ekonomi sebagai alat tawar-menawar dalam memperjuangkan agenda politiknya. Dalam konteks ini, kedaulatan hanya menjadi konsep normatif, secara *real politik* hubungan hierarki negara pusat dan negara-negara bawahan tidak jauh dari kenyataan. Hal ini sudah terjadi dengan Kamboja dan Laos yang disebut oleh media dan para akademisi sebagai "*vassals*" atau "*client states*" dari Beijing (Edgar Pang, "Same-same but Different": Laos and Cambodia's Political Embrace of China", *Perspective*, ISEAS Yusof Ishak Institute, Issue 2017 No. 66).

Keempat, sistem *Tianxia* menjamin kebebasan mobilitas penduduk untuk bermigrasi karena sistem ini tidak mengenal kedaulatan wilayah. Dengan konektivitas BRI yang menghubungkan Rotterdam hingga Xi'an dan Fuzhou hingga Venice (lihat Gambar 1) akan memudahkan mobilitas masyarakat dunia. Bukan hanya mobilitas manusia, tetapi barang dan jasa akan semakin terintegrasi sehingga tatanan dunia akan menjadi semakin terorientasi kepada China daripada Amerika dan sekutu-sekutunya.

Seiring dengan semakin besarnya peran China di berbagai bidang, sistem/tata pemerintahan internasional juga mengalami penyesuaian. China tidak hanya membutuhkan ruang untuk berperan di dalamnya, tetapi juga memiliki andil dalam membentuk tata pemerintahan internasional. Bagaimana peran China dalam menempatkan diri dan membentuk tata pemerintahan internasional, menjadi pertanyaan kunci bagi para pemimpin politik dan akademisi.

China menyadari bahwa dirinya adalah sebuah entitas politik yang memiliki sejarah panjang. Maka, dalam memainkan peran di dunia internasional saat ini China menjadikan sejarah dan filsafatnya sebagai rujukan. Walaupun China telah mengambil bentuk sebagai Republik Rakyat China – dengan sosialisme sebagai ideologi dan Partai Komunis sebagai institusi pemimpin – negara ini menyadari bahwa di tengah-tengah sistem politik internasional, ia harus tetap menjadi China dengan identitas sejarah yang unik. China yang jaya dalam sejarah adalah negara pusat yang melindungi dan merawat negara-negara bawahan dengan konsep *Tianxia*, terutama pada zaman Dinasti Zhou yang adalah dinasti dengan masa kekuasaan terlama. Dengan konsep *Tianxia* ini China berhasil menempatkan dirinya dalam sejarah dan politik dunia dan berkontribusi untuk mewujudkan universalisme, distribusi kesejahteraan umum yang adil, dan keharmonisan antarperadaban.

Di masa kini, ketika China telah menjadi besar dan kuat, negara ini terpanggil untuk berperan sesuai dengan identitas sejarahnya. Inilah inti dari diktum Presiden Xi Jinping "Kebangkitan Bangsa China" (中华民族伟大复兴). Xi dengan jelas menyampaikan "Mimpi China" (中国梦) untuk berperan membentuk tata dunia yang baru, yaitu "Komunitas Manusia dengan Masa Depan Bersama" (人类命运共同体) yang merujuk kepada sistem *Tianxia*. *Tianxia* bukan lagi masa lalu, *Tianxia* (bisa jadi) adalah masa depan, karena ia memberi gambaran tentang tata pemerintahan dunia yang ingin diwujudkan China. BRI telah menjadi instrumen yang nyata untuk mewujudkan ide tersebut. Oleh sebab itu, memahami *Tianxia* menjadi penting bagi kita yang berusaha membaca tanda-tanda zaman. ●

**Klaus Heinrich Raditio,**

Ph.D dari Department of Government and International Relations, The University of Sydney